



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 55/13.A/K/2018

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi adalah informasi setiap saat, informasi berkala, dan informasi serta merta
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan d maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang jenis-jenis Informasi Publik.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 430)

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lembar Pengujian Konsekuensi ini merupakan Informasi yang Ditetapkan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002 Tahun 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 17 JANUARI 2018

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

BACHRUM HARAHAP



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 002 TAHUN 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula Kantor Bupati
Telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

A. Informasi Berkala

No.	Nama Dokumen	2016	2017	Keterangan
1	Visi dan Misi Bupati dan SKPD Kabupaten Padang Lawas Utara ✓			
2	Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kabupaten Padang Lawas Utara ✓			
3	Nama dan Alamat OPD se Kabupaten Padang Lawas Utara ✓			
4	Rekapitulasi PNS Kabupaten Padang Lawas Utara			
5	Ringkasan LHKPN Kabupaten Padang Lawas Utara ✓			
6	Program dan Kegiatan OPD			
7	Informasi Kinerja OPD			
8	Laporan-Realisasi Anggaran (Tahunan)			
9	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik			
	Register Permohonan			
	Register Keberatan			
	Register Sengketa			

10	Daftar Peraturan dan Perundangan Kabupaten Padang Lawas Utara			
11	Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara			
12	laporan Tahunan PPID			
13	Daftar ASN yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar, Ujian Dinas			
14	Rekapitulasi jumlah ASN yang dijabat Hukuman Disiplin			
15	Daftar ASN yang memperoleh satya lencana (penghargaan)			
16	Daftar jumlah ASN berdasarkan pangkat, jabatan dan pendidikan			
17	Daftar ASN yang memasuki BUP (Batas Usia Pensiun)			
18	Daftar ASN yang naik Pangkat/Golongan			
19	Daftar ASN yang pindah masuk/keluar			
20	Daftar Mutasi dalam jabatan			
21	Laporan realisasi tanam dan panen			
22	Rekapitulasi jumlah penduduk Káb. Padang Lawas Utara			
23	Jadwal layanan Dokter Spesialis			
24	Daftar koleksi buku			
25	Daftar nama penyuluh pertanian per wilayah kerja			
26	Daftar nama penyuluh KB per wilayah kerja			
27	Daftar Nama-nama anggota DPRD Kab. Padang Lawas Utara			
28	Daftar nama lembaga/sekolah PAUD, SD dan SMP per Kecamatan			
29	Daftar Nama-nama koperasi se-Kab. Padang Lawas Utara			
30	Rekapitulasi pencari kerja di Kab. Padang Lawas Utara			
31	Rekapitulasi jumlah TKI di Kab. Padang Lawas Utara			
32	Nama-nama Puskesmas beserta kriteria puskesmas			

33	Daftar destinasi Pariwisata di Kab. Padang Lawas Utara		
34	Daftar Atlet yang dibina oleh Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		
35	Daftar Atlet berprestasi di Kab. Padang Lawas Utara		
36	Jadwal kegiatan POPDA, POSPEDASU dan POSPENAS		

B. Informasi Setiap Saat

No	Nama Dokumen	2016	2017	Keterangan
1	Daftar Informasi Publik			
2	Daftar Peraturan dan Perundangan Kabupaten Padang Lawas Utara			
	Peraturan Daerah			
	Peraturan Bupati			
3	Ringkasan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara			
	a. Ringkasan RKA OPD			
	b. Ringkasan RKA OPD			
	c. Rancangan Perda APBD			
	d. Perda APBD			
	e. Rancangan Perda Perubahan APBD			
	f. Ringkasan DPA OPD			
	g. DPA PPKD			
	h. LRA OPD			
	i. LRA PPKD			
	j. Laporan Arus Kas			
	k. Laporan Neraca			
	l. Laporan Operasional			
	m. Laporan Perubahan Ekuitas			
	n. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK			
4	Informasi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Padang Lawas Utara			
	a. Daftar Program dan Kegiatan SKPD			
	b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Rencana Umum Pengadaan)			
5	Internal dan Laporan Masyarakat			

6	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	
8	LKPD (audited)	
9	Opini BPK atas LKPD	

C. Informasi Serta Merta

1. Informasi Ketersediaan Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit dan Puskesmas
2. Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Informasi Rawan Bencana

D. Informasi Yang dikecualikan

	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	000 UMUM				
1	Arsip peta foto udara	UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j - UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia		Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan		Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum pembajakan /		Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan		Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008	Menghambat kebijakan pemerintah		Memperlancar proses dan kebijakan

		Huruf l dan j	daerah	pemerintah
5	Disposisi surat pimpinan	UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Rencana pelaksanaan tukarmenukar / pemindah tangan barang daerah	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan l	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan kepentingan umum dapat tercapai
7	100 PEMERINTAHAN Surat pengaduan masyarakat	UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap
8	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 370; - PP No. 16 Th 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 69 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap
9	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	- UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 tahun 2015	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)

		tentang persidangan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	kewenangan (tanggung jawab)	
10	Proses pengangkatan perangkat desa	- UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008; - PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- Perda No 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 13 huruf a; - UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2). - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, l, dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
12	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa	- UU No. 6 Th 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau

			menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap		tidak boleh diungkap
13	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades	- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap		1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
14	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, h, dan l	1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap		(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
15	Rancangan keputusan bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum	- Peraturan Bupati Batang No.90 tahun 2012 Bab VI ps. 16 ayat 2 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang		1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau

			menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	tidak boleh diungkap
16	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
17	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
19	Berita Acara pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan	1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU

			dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	200 POLITIK			
20	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	(1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
21	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Anggota/Pimpinan DPRD	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
22	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
23	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	- PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

24	Data kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf c, l, dan j	1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah/ dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga dan pertahanan negara dan/ atau daerah/ wilayah/ dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
25	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan- Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
26	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKD Provinsi Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
27	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- Kep Menhukham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, l, dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses	1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3)

			penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
28	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pidana	- UU No. 23 Tahun 2014 ; - PP No. 6 Tahun 2010; - UU No. 14 Th 2008, Pasal 17 huruf a, l, dan j	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Memperlancar proses hukum/ penyidikan/ penyidikan. (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT			
29	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Merugikan ketahanan Ekonomi
30	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Merugikan ketahanan Ekonomi
31	Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll	- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Penunjuk Operasional Sistem	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang	1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU

			menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
32	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
33	Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Petukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3) dan Pemeliharaan Paskibra	- UU No. 3 Th. 2005 Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4); - UU no. 40 Th. 2009 Pasal 27 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
34	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
35	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008	1) Dapat mengungkap rahasia	(1) Melindungi rahasia pribadi

	Huruf h dan j		pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
36	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	(1) Dapat mengungkapkan Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
37	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	pada: - sarana kesehatan - Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
38	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan proses penyusunan kebijakan	Dapat mengungkapkan proses penyusunan kebijakan
39	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan proses penyusunan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

			kebijakan	
40	Data Kelayan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
41	Data pribadi penduduk	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi
42	Daftar rekam medik PNS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
43	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, l dan j	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
44	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
45	Surat Perijinan/Ijin Usaha beserta dokumennya	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
46	Data kekayaan alam	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
47	Mempermudah pengelolaan dan	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008	Berpotensi munculnya spekulasi	Lebih mengedepankan optimalisasi

	pengaturan sumber daya alam	tentang KIP pasal 7 huruf e dan j	yang bermaksud mengambil keuntungan	untuk kepentingan pembangunan
48	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
49	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

55	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
56	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
57	Dokumen izin usaha pertambangan (IUP)	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, dan j	Membuka privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
58	Hasil eksplorasi detail (koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, e, dan j	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelola demi kepentingan pribadi / korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
59	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
60	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	- UU No. 4 Th. 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 89 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, d, e, dan j	Mengganggu obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
61	Data Teknis Potensi Air Tanah	- PP No. 43 Th. 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat (3) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
62	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	- UU No. 4 Th. 2009 Pasal 88 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, d, dan j	Potensi timbulnya manipulasi data	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi

			oleh pihak pemakai	
63	Data Teknis hasil kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	- UU No. 27 Th. 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf d dan j	Berpotensi terbukanya investasi yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat	Mendorong eksplorasi dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat luas
64	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
65	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
66	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), perbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Potensi munculnya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha	Menjaga dari potensi manipulasi yang dilakukan oleh pengusaha
67	Data jaringan bisnis perusahaan/Badan Usaha	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Berpotensi munculnya persaingan tidak sehat	Menjamin iklim persaingan usaha yang sehat
68	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan l		
69	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
70	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

71	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
72	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
73	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
74	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l, dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa
75	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l, dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
76	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
77	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan l	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

78	Hasil Uji Laboratorium pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2008 Huruf e dan l	Bisa berpotensi dipalsukan dan disalahgunakan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
79	Proses penetapan penerimaan bantuan sosial masyarakat	Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf l	Berpotensi menimbulkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuliskan perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah
80	Biodata individu dan data keluarga :	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
	a. Ketenagakerjaan			
	b. Transmigrasi			
81	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j.	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
	700 PENGAWASAN			
82	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Mengganggu ketentruman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketentruman masyarakat
83	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
84	Dokumen Hasil pengawasan melekat (Waskat)	- Kepmenpan No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
85	Rencana pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 14 Tahun 2008	Mengganggu pelaksanaan pengawasan: Hanya ditujukan untuk	Sesuai dengan asas pengawasan dalam rangka perbaikan

	tentang KIP, Pasal 17 huruf a, l, dan j	yang dilakukan pengawasan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
86	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
87	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
88	800 KEPEGAWAIAN Soal – soal ujian	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
89	Pencapaian uji kompetensi	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
90	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
91	Data hasil check Up perorangan PNS/Pejabat	Mengganggu rahasia pribadi sescorang	Menjaga rahasia pribadi sescorang
92	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Mengganggu rahasia pribadi sescorang	Menjaga rahasia pribadi sescorang
93	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Mengganggu rahasia pribadi sescorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi sescorang
94	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib

95	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Mengganggu kebijakan pemerintah		Menjaga kebijakan pemerintah
96	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah		Menjaga kebijakan pemerintah
97	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Mengganggu penyusunan kebijakan		Mengamankan proses penyusunan kebijakan
98	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III; Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan		Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
99	Soal Tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l	Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi		Menjaga akuntabilitas seleksi

100	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Th 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf l dan j	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
101	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Th 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf l dan j	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
102	Daftar nilai DP3 PNS dan SKP	- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, Pasal 5/6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
103	Keputusan penjatihan Hukum disiplin PNS	- PP Nomor 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Th 2010, Romawi IX Angka 8 - UU Noh, l, dan jg KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf l	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan diatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
104	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- PP No. 10 Th 1983 jo. PP No. 45 Th 1990 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
105	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	- PP No. 9 Th 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

			adanya pengungkapan secara premature	
106	Biodata elektronik PNS lengkap	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
107	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
108	Arsip data perorangan PNS	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
109	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
110	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5 - Pasal 17 UU NO 14 Th	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

111	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	2008 Huruf l c Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
112	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
113	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
900-KEUANGAN				
114	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
115	Rencana Alokasi dana Talangan untuk Kabupaten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan l	Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat	Mengamankan kebijakan pusat kdaerah
116	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi
117	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; - UU No. 32 Th 2004	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

		2008 Huruf l	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
111	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l		
112	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
113	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
114	900-KEUANGAN Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
115	Rencana Alokasi dana Talangan untuk Kabupaten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan l	Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat	Mengamankan kebijakan pusat kdaerah
116	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi
117	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; - UU No. 32 Th 2004	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada No. 1 diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	UUD
1			Sekretariat Daerah Kabupaten	
2			Sekretariat DPRD	
3			Inspektorat	
4			Dinas Pendidikan	
5			Dinas Kesehatan	
6			Satuan Polisi Pamong Praja	
7			Dinas PP, KB, PV dan PA	
8			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
10			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
11			Dinas Komunikasi dan Informatika	
12			Dinas Kependudukan dan Olah Raga	
13			Dinas Pariwisata	
14			Dinas PKPPIS	
15			Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM	
16			Dinas PU dan PR	
17			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman	
18			Dinas Sosial	
19			Dinas Perindustrian dan Kearsifan	
20			Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	

21			Dinas Pertanian	
22			Dinas Ketahanan Pangan	
23			Dinas Lingkungan Hidup	
24			Dinas Perhubungan	
25			BPPD	
26			BPKPAD	
27			BKD	
28			BPBD	
29			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
30			RSUD	
31			Kec. Padang Bolak	
32			Kec. Portibi	
33			Kec. Halongonan	
34			Kec. Simangambat	
35			Kec. Padang Bolak Julu	
36			Kec. Dolok	
37			Kec. Dolok Sigompulon	
38			Kec. Padang Bolak Tenggara	
39			Kec. Batang Onang	

40				Kec. Halongonan Timur	
41				Kec. Ujung Batu	
42				Kec. Hulu Sihapas	

